

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Apakah politik itu sebenarnya? Politik dalam Bahasa Arabnya disebut siyasah, selanjutnya kata ini diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam Bahasa Inggrisnya disebut *politics*. dalam pengertian sederhana politik seakan-akan sebagai suatu cara untuk mewujudkan tujuan, tetapi para ahli politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi untuk ilmu politik.<sup>1</sup>

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain dari pada itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakikat negara serta bentuk dan tujuan negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti kelompok elit, kelompok kepentingan, kelompok penekanan, pendapat umum, peranan partai politik, dan kebenaran pemilihan umum.<sup>2</sup>

Partai politik memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan politik yang demokratis. Dalam kehidupan politik modern keberadaan partai politik menjadi keharusan. Salah satu fungsi utama partai politik adalah bersaing untuk memenangkan pemilu, mengagregasikan berbagai kepentingan masyarakat,

---

<sup>1</sup> Kencana Syafiie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal. 9.

<sup>2</sup> Kencana Syafiie, *Ilmu Politik...*, hal. 1.

menyediakan alternatif kebijakan, dan mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan.<sup>3</sup>

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legislatif) dan damai.<sup>4</sup>

Secara umum partai politik dikatakan sebagai satu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.

Partai politik (parpol) adalah perkumpulan (segolongan orang-orang) yang sejasas, sehaluan setujuan (terutama dibidang politik). Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka; maupun yang berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.<sup>5</sup> Dalam KBBI Parpol juga berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Akbar Tandjung, *Partai Golkar Dalam Pergolakan Politik Era Reformasi: Tantangan dan Respons*, Disertasi, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007), hal. 1.

<sup>4</sup> Ichlasul Amal, *Teory Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Mutiara, 1996), hlm. 11.

<sup>5</sup> P.K. Poerwantana, *Partai politik di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 6.

<sup>6</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 831.

Dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2002 Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.<sup>7</sup>

Terminologi partai politik, menurut Paige Johnson Tan dan juga Giovanni Sartori, adalah kelompok politik apa saja yang ikut serta dalam pemilu dan mampu menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan publik. Tujuan didirikan partai politik adalah untuk meraih jabatan politik, mendapatkan kekuasaan politik dan mengontrol proses perumusan kebijakan. Partai politik dengan demikian menjadi sarana penghubung kepentingan rakyat dan pembuat kebijakan dalam pemerintahan demokrasi.<sup>8</sup>

Dalam bukunya Miftah Thoha yang berjudul *Birokrasi dan Politik di Indonesia* dikemukakan bahwa partai politik merupakan organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara pemilihan yang demokratis. Oleh karena itu partai politik bekerja melalui mekanisme perwakilan rakyat (DPR). Berbeda dengan kelompok penekan, kelompok ini bekerja tidak ada kaitannya dengan dua mekanisme demokrasi tersebut yaitu pemilihan dan perwakilan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Anonim, *Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 3.

<sup>8</sup> Akbar Tandjung, *Partai Golkar Dalam pergolakan...*, hal. 1.

<sup>9</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 94.

Berdasarkan pada pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana yang terkemuka diatas, maka Haryanto dalam bukunya yang berjudul *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, menarik suatu pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan partai politik pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan dan orientasi-orientasi yang sama, dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan atau mengontrol jalannya roda pemerintahan; yang kesemuanya itu pada gilirannya sebagai pangkal tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-programnya yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Adanya partai politik di negara-negara di dunia ini mempunyai alasan yang kuat. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi didasarkan atas suatu anggapan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang politik, dan untuk menampung partisipasi warga negara tersebut maka dibentuk partai politik. Sedangkan di negara-negara yang menganut paham totaliter, keberadaan partai politik didasarkan atas suatu anggapan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali perlu mendapatkan bimbingan, mengarahkan dan membina warga negara dalam rangka berpartisipasi politik tersebut diperlukan suatu wadah atau sarana yang memadai, yaitu partai politik.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 9.

<sup>11</sup> Haryanto, *Partai Politik...*, hal. 3.

Partai politik pertama-tama lahir dinegara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antar rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.<sup>12</sup>

Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik memiliki peranan yang penting terutama dalam rangka proses konsolidasi demokrasi. Karena itu, ketika demokrasi berkembang ke seluruh penjuru dunia pada 1990-an, peran partai politik mengalami perkembangan yang pesat pula. Peran penting partai politik ini semakin nyata ketika demokratisasi semakin meluas ke negara-negara berkembang antara 1970-an sampai 1990-an. Periode ini oleh Huntington disebut sebagai ‘gelombang ketiga demokrasi’.<sup>13</sup>

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat yang berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijakan umum (public policy).<sup>14</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Maka, kemunculan partai politik di Indonesia juga menunjukkan adanya partisipasi rakyat turut serta dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di Negara Indonesia.

---

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 159.

<sup>13</sup> Akbar Tandjung, *Partai Golkar Dalam pergolakan...*, hal. 2.

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu...*, hal. 160.

Dalam bukunya Miriam Budiardjo disebutkan bahwa partai politik di Indonesia pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua organisasi, apakah dia bertujuan sosial (seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah) ataukah terang-terangan menganut azas politik atau agama (seperti PNI dan PKI), memainkan peranan penting dalam perkembangannya pergerakan nasional. Pola kepartaian masa ini menunjukkan keanekaragaman, pola mana dirumuskan dalam masa merdeka dalam bentuk sistem multi partai.<sup>15</sup>

Timbulnya sejarah partai politik diawali dari permulaan usaha penyusunan pemerintahan sentral republik yang di dasarkan atas pasal-pasal I-IV aturan peralihan UUD 1945, dan dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah RI tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan kemerdekaan. Dan setelah adanya maklumat tersebut maka bermunculan berbagai partai politik di Indonesia.<sup>16</sup>

Pada era reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 telah mengubah kehidupan berbangsa dan bernegara, bernegara serta pemerintahan. Perubahan sistem ini tercermin kepada pergantian UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah menjadi UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Perubahan ini tampak lebih berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan demokrasi dari pada efisiensi

---

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu...*, hal. 25.

<sup>16</sup> P.K. Poerwantara, *Partol di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadaha, 1994), hal. 25.

administrasi. Meski UU tersebut telah disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, semangat partisipasi masyarakat tetap dipertahankan dengan merencanakan perlunya efisiensi dalam penyelenggaraannya. Kini daerah memiliki jumlah dan bobot yang lebih besar dari pada sebelumnya secara politis, dan daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dari pada sebelumnya.<sup>17</sup>

Maklumat tersebut berisi bahwa “ pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala paham yang ada dalam masyarakat”. Selanjutnya maklumat itu memuat bahwa pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilakukannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat (BPR) pada bulan Januari 1946.<sup>18</sup>

Pada tahun 1997, Diamond mencatat dari 191 negara yang ada di dunia, sebanyak 117 (61,3%) menganut sistem demokrasi. Indonesia baru mencatatkan kembali dalam jajaran negara-negara demokrasi setelah melakukan reformasi pada 1998 dan melaksanakan pemilu pertama pada era reformasi 1999, yang diikuti 48 partai politik. Bahkan saat ini Indonesia, dari ukuran populasinya, disebut-sebut Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> M. R. Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, (Malang: Bayu Media, 2006), hal. 95.

<sup>18</sup> Lili Romli, “Mencari Format Sistem Kepartaian Masa Depan”, *Jurnal Politika*, No.2, 2006, hal. 19.

<sup>19</sup> Akbar Tandjung, *Partai Golkar dalam Pergolakan...*, hal. 3.

Siapun yang mengkaji demokrasi tentu tidak akan melupakan 2 hal :

“demokrasi prosedural” dan sistem demokrasi. “Demokrasi prosedural “ diantaranya terwujud dalam partisipasi rakyat dan Pemilu, transparansi akuntabilitas. Dalam konteks pemilu, misalnya sejak merdeka hingga hari ini, Indonesia sudah menyelenggarakan beberapa kali pemilu. Yang terakhir adalah pemilu 2004, yang dinilai paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia dan relatif aman terkendali. Jadi wajar belega jika dari sisi ini, Indonesia dianggap sebagai salah satu Negara paling demokratis.<sup>20</sup>

Baik dalam pemerintahan suatu negara yang *konservatif* ataupun yang *revolusioner*, atau apakah dalam suatu pemerintahan yang didukung oleh kelompok elit tentu ataupun yang didukung oleh massa, atau suatu pemerintah yang mengikuti sistem *pluralis demokrasi* atau *diktator mololistic*, maka suatu partai politik itu dibentuk tidak lain kecuali untuk berfungsi menjalankan kekuasaan politik. Fungsi ini dilakukian oleh partai politik berfungsi sebagai *oposisi* di dalam pemerintahan.

Partai politik dengan kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan. Justru partai politik diadakan itu tidak lain kecuali untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Kekuasaan itu hakikatnya berasal dari rakyat, dan sarana rakyat untuk mewujudkan kekuasaannya itu melalui partai politik.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Anonim, “Hakikat Buruk demokrasi”, *Buletin Dakwah Jurnal Al-islam*, Edisi 379.

<sup>21</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik...*, hal. 95-97.

Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa dalam Negara demokrasi, partai politik menyelenggarakan empat fungsi, yaitu; partai sebagai sarana komunikasi politik, partai sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik sebagai sarana recruitment politik; dan partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Meskipun dalam praktek politik sering dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan.<sup>22</sup>

Bangkitnya gerakan mahasiswa angkatan 1998, yang secara gemilang menumbangkan Rezim Soeharto sungguh menarik dicermati. Betapa tidak, setelah pergerakan '45, era 66, dan peristiwa Malari pertengahan 70-an, mungkin baru sekarang inilah gerakan mahasiswa kembali terlihat “kejayaannya”. Mereka mendesak aspirasi lewat berbagai aksi yang dilakukannya dengan jumlah massa yang masif dan dramatis.<sup>23</sup>

Berbagai peristiwa dari diskusi yang terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, pembentukan kelompok, komite, *istighotsah* dan lain sebagainya, mengantarkan bangsa dan Negara Indonesia kepada peristiwa bersejarah. Pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto yang telah memimpin bangsa dan Negara Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun menyatakan berhenti dari jabatannya. Maka berakhirlah era pembangunan. Bangsa dan Negara Indonesia memasuki era baru yang sering disebut sebagai era reformasi.

---

<sup>22</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu...*, hal 166.

<sup>23</sup> Syafarudin (ed), *Menembus Arus Prespektif Reformasi dari Lampung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 354.

Reformasi pasca otoritarisme Orde Baru, telah menghidupkan kembali demokrasi. Pertumbuhan partai politik pada masa itu tidak terhindarkan lagi, sebab partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang ada di dalam suatu negara modern. Ada beberapa partai yang berdiri setelah Orde Baru, diantaranya Partai Keadilan.<sup>24</sup> Hal itu terbukti pada pemilu 1999 telah munculah 48 partai politik, termasuk di dalamnya ada beberapa partai Islam. Situasi ini memengaruhi kembali aktif dalam dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partai tertentu.<sup>25</sup>

Dengan demikian, reformasi yang tak lain adalah sebuah harakatul islah “gerakan perbaikan”, menjadi sebuah komitmen langsung dari gerakan dakwah Islam yang berkembang. Oleh karenanya, para pemuda dan mahasiswa muslim aktivis gerakan dakwah Islam pun ikut terlibat dalam proses yang puncaknya pada Mei 1998 yang lalu.<sup>26</sup>

Kabupaten Bekasi sebagai daerah penyangga ibu Kota di Jakarta serta daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi syarat dengan perubahan dibidang perekonomian, membangun industri pembangunan infrastruktur, pola kebudayaan, maupun tatanan sosial dan politiknya, akibat dari perubahan yang sangat cepat tersebut telah mengakibatkan

---

<sup>24</sup> Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal. 187.

<sup>25</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 89.

<sup>26</sup> Sahar L. Hasan, dkk, *Memilih Partai Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm 31.

ledakan jumlah penduduk yang mulai tak terkendali, tercatat hingga saat ini diperkirakan penduduk Kabupaten Bekasi mencapai angka 2,6 juta jiwa.<sup>27</sup>

Bekasi yang kini Kabupaten mempunyai sejarah tersendiri dalam pembentukannya. Bekasi juga merupakan daerah yang diduduki oleh penjajahan Belanda dan Jepang, pasca kemerdekaan Bekasi ditata menjadi Kabupaten, terbentuknya Kabupaten Bekasi juga tidak lepas dari aspirasi masyarakat Bekasi untuk dibentuknya Kabupaten Bekasi yang awalnya kabupaten Jatinegara.

Kabupaten Bekasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tertanggal 15 Agustus 1950. Pada saat itu, Kabupaten Bekasi terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan dan 95 desa. Dan perkembangan pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu menuntut adanya pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 1981 kecamatan Bekasi ditingkatkan statusnya menjadi Kota administratif Bekasi yang meliputi 4 kecamatan, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara. Dari kecamatan itu terdiri dari 18 kelurahan dan 8 desa. Pemekaran itu dilakukan atas tuntutan masyarakat perkotaan yang memerlukan adanya pelayanan khusus. Oembentukan kota administrasi Bekasi digelar pada tanggal 20 April 1981 yang dihadiri Menteri dalam Negeri (Mendagri). Dan perkembangan yang ditunjukkan Kota administrasi Bekasi mampu memberikan dukungan panggilan potensi di wilayahnya untuk menyelenggarakan Otonomi daerah. Dan untuk mendukung jalannya roda pemerintahan, maka keluarlah UU No. 9 tahun 1996 yang

---

<sup>27</sup> Anonim, <http://Kompasiana.com> [diakses pada tanggal 4 Mei 2017].

mendukung berubahnya Kota Administrasi Bekasi menjadi Kotamadya Daerah

Tingkat 2 Bekasi dan yang menjabat sebagai walikotamadya adalah Drs.H.Khailani AR, selama satu tahun(1997/1998).<sup>28</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 febuari 1998 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 2 Bekasi dijabat oleh Drs. H. Nonon Sonthanie (1998-2003). Setelah pemilihan umum berlangsung terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yaitu: Akhmad Zurfaih dan Moctar Muhammad (periode 2003-2008), dan pada tahun 2008 Moctar Muhammad sebagai Walikota dan Rahmat Effendi S.Sos sebagai Wakil Walikota (periode 2008-2013), yang terpilih lewat pemilihan kepala daerah langsung olwh warga Bekasi.

Perubahan besar Kabupaten Bekasi di bidang politik yang menonjol dalam era reformasi terefleksi dalamkelembagaan legislatif dan dan sikap dan perilaku politik dalam masyarakat. Lembaga legislatif semula (khususnya berdasarkan pemilu 1997) diisi oleh 2 partai politik (PPP dan PDI), Gokar dan unsur ABRI dengan jumlah anggota 45 orang. Saat sekarang dari hasil pemilu 1999, lembaga ini diisi oleh 45 orang yang berasal 8 partai politik yaitu PDIP, GOLKAR, PPP, PAN, PBB, PK, PKP dan unsur TNI/POLRI.

Perilaku dan sikap politik yang berkembang dalam masyarakat sangat berbeda jauh dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Hal ini tercermin dari makin aktif, kritis dan beraninya masyarakat mengamati dan memberikan kontrol terhadap

---

<sup>28</sup> Anonim, [www.KabupatenBekasi.go.id](http://www.KabupatenBekasi.go.id) [diakses pada tanggal 4 Mei 2017].

penyelenggaraan pemerintahan serta komitmen yang kuat dalam melaksanakan reformasi yang pada dasarnya ingin menuju tatanan masyarakat Indonesia baru.

Partai Keadilan (PK) lahir dari gerakan Tarbiyah dari beberapa kampus di Indonesia. Gerakan Tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul di awal 1980-an di Era Orde Baru. Gerakan Tarbiyah bisa difahami sebagai alternatif dari berbagai gerakan Islam. Untuk memahami di mana letak PKS dalam peta gerakan Islam lain maka *setting* politik saat itu perlu dicermati. Di sini perlu diingat bahwa penguasa Orde Baru melakukan represi hambatan terhadap aktivitas Islam politik. Islam politik adalah kecenderungan sebagian muslim yang aktif di sektor politik dengan membawa aspirasi agama Islam.

Bedanya Partai Keadilan Sejahtera dengan partai-partai Islam lainnya memiliki persentuhan yang sedikit di tingkat akar rumput dan hanya melakukan proses kaderisasi yang sporadis, PKS tampil berbeda melalui sistem kaderisasi yang terorganisir dan sistematis serta meniscayakan komitmen dan keterlibatan aktif para kadernya.

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin yang di jalankan seperti *halaqah* dan *liqa* tetap menjadi aspek-aspek penting dalam kehidupan partai dan anggota-anggotanya. Kader yang mengabaikan loyalitas dan komitmen total terhadap nilai-nilai dakwah akan sulit berkembang di dalam partai. Melalui proses kaderisasi-kaderisasi ini. PKS menuntut anggota-anggotanya mengamalkan norma-norma

dan ajaran-ajaran Islam. Anggota-anggotanya mengadakan pertemuan seminggu untuk membaca Al-quran.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis menggarisbawahi dua permasalahan yang menjadi dasar karya ilmiah ini yaitu:

1. Bagaimana proses berdirinya PKS di Bekasi ?
2. Bagaimana perkembangan PKS di Bekasi tahun 1998-2014 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah memberi jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Selain itu, dimaksudkan sebagai salah satu upaya penulis untuk menambah literatur sejarah, khususnya memberikan pengetahuan tentang lahir dan perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di tahun 1998-2004. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui proses berdirinya Partai Keadilan Sejahtera.
2. Untuk mengetahui perkembangan Partai Keadilan Sejahtera 1998-2014.

### **D. Kajian Pustaka**

Rencana penelitian tentang “Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera 1998-2014’ ini tidak semata-mata dibuat begitu saja tanpa melihat karya-karya orang lain

sebagai pembanding. Penulis telah melakukan observasi ke lapangan guna mencari buku-buku atau skripsi yang membahas Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera.

Hasil dari observasi tersebut penulis menemukan buku dan skripsi yang membahas hal tersebut yaitu :

1. Skripsi berjudul Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung Tahun 1998-2004 yang ditulis oleh Jalaludin Malik. Dalam skripsi ini membahas tentang Pendirian dan perkembangan partaii keadilan (PKS), tidak pisah terpisahkan dengan kemunculan dan perkembangan Partai Keadilan (PK), di kabupaten Bandung perkembangan PK dan PKS di pengaruhi oleh dua factor, yaitu; factor eksternal sosial politik dan factor internal partai di tingkat pusat dalam menyikapi berbagai persoalan politik kedaerahan.

Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan partai keadilan sejahtera (PKS) adalah kondisi sosial politik masyarakat kabupaten Bandung pada awal reformasi dengan bermunculannya partai-partai politik yang beragam dengan berbagai latar belakang ormas yang ada pada saat itu. Sedangkan factor internal ialah adanya perkembangan kebijakan partai di tingkat pusat, untuk membentuk struktur di tingkat daerah kabupaten Bandung.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan; bahwa pada awal pendirian Partai Keadilan (PK) di Kabupaten Bandung sebagian besar masyarakat

menilai partai ini sebagai partai yang paling eksklusif, karena menyentuh

kalangan-kalangan menengah terdidik, yang notabene kalangan-kalangan kampus. Kesamaan skripsi terletak pada rumusan masalah hanya saja yang membedakan skripsi ini yaitu kondisi letak geografis antara Bandung dan Bekasi

2. Memilih Partai Islam. karya Sahar L. Hassan dkk buku (Jakarta: Gemma Insani, 1998). Di dalam buku ini menguraikan gambaran umum tentang perkembangan Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai politik yang didirikan oleh sejumlah aktivis muslim di tengah iklim demokratis yang di peluangnya dibuka oleh reformasi Indonesia. Bisa jadi, kemunculan Partai Keadilan, itu seperti hanyalah Partai Lain , mengundang sejumlah tanda Tanya. Oleh karena itu, penjelasan gambling yang menggambarkan berbagai sisi partai ini amat diperlukan untuk membantu masyarakat dalam memahami dan sekaligus membuka ruang-ruang ke akrabannya yang membuahkan ukhuwah islamiyah semaksimal terjalin apik,
3. Islam Yes Partai Islam Yes. Karya Lili Romli Buku (Jakarta: Pustaka Pelajar 2006). Di dalam buku ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan partai-partai Islam di Indonesia. Buku ini mencoba mencatat hal-hal penting yang terjadi dalam setiap kurun waktu dalam sejarah politik Indonesi modern, di mulai dari tahun 1945 sampai sekarang. Focus yang di perhatian yang diberikan adalah pada pertumbuhan partai-partai politik Islam dan ubungannya dengan Negara. Perhatian ditujukan pada perkembangan partai-partai Islam pada masa pasca Orde Baru.

## E. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Tahapan Heuristik

Tahapan heuristik yaitu tahapan atau kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, dan jejak masa lampau. Oleh karenanya pada tahapan ini penulis melakukan observasi dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, guna menghimpun sumber, baik itu sumber lisan maupun sumber tulisan dokumen-dokumen yang kemudian di klarifikasikan ke dalam kedua kategori sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Adapun sumber arsip dan dokumen yang di gunakan antara lain :

- a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat Nomor: 62/SKEP/AJ-PKSS/VI/1424. Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bekasi
- b. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat Nomor: 033/SKEP/AJ\_PKS/V/1429. Tentang Revisi Susunan Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD kabupaten Bekasi.
  - 1) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera.
  - 2) Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera.
  - 3) Surat Edaran Nomor : 02/D/EDR/DPP-PKS/1437 Tentang Pilkada Serentak.

- 4) Draft Khitob Qiyadi, Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat pada Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah Partai Keadilan Sejahtera.
- 5) Bayan Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 39/K/DSP-PKS/1434H. Tentang Sikap Da'I Dalam Menghadapi Fitnah dan Ujian.
- 6) Tadzkiroh Tentang Menghindari Bisnis yang Spekulatif dan Money Game Nomor: 13/TZK/DSP-PKS/1433H.
- 7) Tadzkiroh Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 14/TK/DSP-PKS/1434H. Tetnag Menghindari Hal-Hal yang Menimbulkan Fitnah.

Adapun sumber wawancara yang di gunakan antara lain :

- a. Muhammad, Nuh, Lc. 51 tahun selaku ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Keadilan Sejahtera PKS Bekasi.
- b. H. Imam Hambali 50 tahun selaku Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Keadilan Sejahtera PKS Bekasi.
- c. Muhammad Romli 36 tahun selaku ketua Dewan Perwakilan Cabang DPC Partai Keadilan Sejahtera PKS Bekasi.
- d. Muhaimain 48 tahun selaku ketua Dewan Perwakilan Cabang DPC Partai Keadilan Sejahtera Bekasi.

Sumber Buku yang di gunakan antara lain

a. Deliar Noer. Mengapa Partai Islam Kalah?. (Jakarta: Komplek TRILOKA No.18, 1999).

b. Lili Romli. Islam Yes Partai Islam Yes. (Jakarta: Pustaka Pelaja 2006).

c. Cholisin & Nasiwan. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Yogyakarta: Ombak, 2012).

## 2. Tahapan Kritik

Tahapan Kritik terhadap berbagai sumber. Metode Sejarah mengenal dua jenis kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal menyangkut otentitas dengan menekankan sumber sezaman atau tidak. Sedangkan Kritik Internal menyangkut kredibilitas sumber maka dilakukan kajian pustaka sumber, dekat menekankan apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Untuk mencapai otentitas dan kredibilitas sumber maka dilakukan kajian pustaka dengan cara membandingkan sumber-sumber yang ada.

### a. Kritik Intern

Proses yang dilakukan oleh penulis dalam tahapan kritik Intern adalah dengan menguji keabsahan tentang kesahihan isi sumber. Dari berbagai sumber arsip yang bisa dikumpulkan maka yang dapat disebutkan isinya selaras untuk kepentingan penelitian yang akan dilakukan adalah susunan kepengurusan DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bekasi, kepengurusan DPD Partai Keadilan Sejahtera. Arsip tersebut keabsahan isinya dapat diakui karena mendapatkan pengesahan dari dewan pimpinan pusat Partai Keadilan Sejahtera. Sementara sumber lisan berasal dari tokoh-tokoh partai dan ulama yang mengetahui seputar dunia partai politik di

Bekasi atau merupakan tokoh yang menjadi saksi perjalanan Bekasi tahun 1998-2014.

#### b. Kritik Ekstern

Dalam pengerjaan kritik ekstern ini, penulis melakukan untuk menguji keabsahan tentang kaslian atau otentisitas sumber. Sumber arsip yang diperoleh dari DPD Partai Keadilan Sejahtera walaupun sumbernya otentik namun arsip yang didapatkan merupakan arsip fotokopi. Arsip arsip yang diperoleh dari DPD Partai Keadilan Sejahtera sumbernya otentik dan keasliannya dapat ditunjukkan dari adanya stempel Partai Asli bukan fotokopi. Arsip susunan kepengurusan DPD Partai Keadilan Sejahtera otentik namun arsip yang didapatkan adalah lembaran fotokopian.

#### 3. Tahapan Interpretasi

Tahapan Interpretasi adalah penafsiran data yang telah dikritik, kemudian dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kesatuan fakta sejarah yang kronologis, ilmiah dan logis. Pada tahap ini, fakta dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kesatuan fakta sejarah yang utuh dan kronologis. Akan tetapi merangkaikan fakta-fakta saja tidak cukup, apabila penelitian sejarah ini tidak semata-mata bertujuan menceritakan kejadian melainkan bermaksud menerangkan kejadian melainkan bermaksud menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, konteks sosial kulturnya. Intinya secara mendalam hendak diadakan analisis tentang factor-faktor kausal

kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji, maka diperlukan teori dan metodologi.<sup>29</sup>

Menurut R.H. Soltao dalam *Dasar-Dasar Ilmu politik* (Budiarjo, 2002 : 161), mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Selain itu, pengertian partai politik adalah sekelompok anggota yang terorganisasi secara rapih dan stabil yang dipersatukan dan di motivasi oleh ideologi, tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu umum, guna melaksanakan alternative kebijakan yang mereka susun.<sup>30</sup>

#### 4. Tahapan Historiografi

Tahapan Historiografi merupakan langkah terakhir dari rangkaian penulisan, yaitu berupa penyusunan laporan yang kemudian menjadi karya sejarah dan disusun secara sistematis serta kronologis. Dalam tahapan ini penulis merekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan fakta yang telah didapatkan pada tahapan sebelumnya. Untuk mempermudah, pembahasan ditulis secara kronologis dan sistematis yang dibagi menjadi empat bab.

Bab I adalah bab pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperjelas masalah-masalah yang ada maka di buat rumusan masalah dalam bentuk

---

<sup>29</sup> Kartodirdjo, 1993, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Cet. Ke-3

<sup>30</sup> R.H. Soltao, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

pertanyaan-pertanyaan sebagai pembatas masalah. Kemudian dikemukakan tujuan penelitian yang bermaksud untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah. Pada bagian akhir, dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian sejarah

Bab II menguraikan sejarah berdirinya Partai Keadilan (Sejahtera), sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Bekasi. Kemudian kondisi sosial politik di Bekasi dan pendiri partai keadilan sejahtera, visi dan misi serta tujuan dan program

Bab III menguraikan tentang perkembangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bekasi tahun 1998-2014, peran dalam pemilu periode 1999-2004, periode 2004-2009, periode 2009-2014.

Bab IV merupakan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai perkembangan Partai Keadilan Sejahtera hingga menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG